

LAPORAN PENELITIAN

DIGITALISASI NILAI LOKAL: INTERNALISASI FALSAFAH HUMA BETANG DALAM TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI KOTA PALANGKA RAYA



Oleh:

Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si

M. Anzarach Pratama, MPA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA

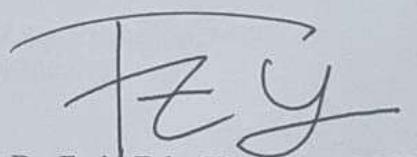
Judul Penelitian	: Digitalisasi Nilai Lokal: Internalisasi Falsafah Huma Betang Dalam Transformasi Birokrasi Digital Di Kota Palangka Raya											
Nama Ketua Peneliti	: Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si											
NIDN	: 1101099002											
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli											
Program Studi	: Administrasi Publik											
Anggota Peneliti	: M. Anzarach PRatama, MPA											
NIDN	: 1117059403											
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli											
Program Studi	: Administrasi Publik											
No. HP	: 082132977778											
Alamat Email	: f.zakyopiannor@umpr.ac.id											
Nama Mahasiswa	<table><tr><td>1. Meilana Permata Sari</td><td>NIM. 22.11.025542</td></tr><tr><td>2. Tri Yulia Fajrianti</td><td>NIM. 22.11.025546</td></tr><tr><td>3. Azira Defita Khairunnisa</td><td>NIM. 22.11.025547</td></tr><tr><td>4. Nabila Meylida</td><td>NIM. 22.11.025550</td></tr><tr><td>5. Fentina Siska</td><td>NIM. 22.11.025551</td></tr></table>		1. Meilana Permata Sari	NIM. 22.11.025542	2. Tri Yulia Fajrianti	NIM. 22.11.025546	3. Azira Defita Khairunnisa	NIM. 22.11.025547	4. Nabila Meylida	NIM. 22.11.025550	5. Fentina Siska	NIM. 22.11.025551
1. Meilana Permata Sari	NIM. 22.11.025542											
2. Tri Yulia Fajrianti	NIM. 22.11.025546											
3. Azira Defita Khairunnisa	NIM. 22.11.025547											
4. Nabila Meylida	NIM. 22.11.025550											
5. Fentina Siska	NIM. 22.11.025551											

Palangka Raya, 10 Desember 2025

Mengetahui,
AN Dekan
Ketua Program Studi,



Ketua Peneliti,


Dr. Farid Zaky Yopiannor, M.Si
NIDN. 1101099002

Mengetahui,
Kepala LP2M UMPR



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Konsep Digital Governance	3
2.2. Huma Betang sebagai Indigineous Values Kalimantan Tengah.....	3
BAB III METODE PENELITIAN.....	5
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Hasil Penelitian	7
4.2. Pembahasan.....	14
BAB V PENUTUP.....	24
5.1. Kesimpulan.....	24
5.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, dan inklusi pelayanan publik. Dalam dekade terakhir, kebijakan nasional seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mendorong birokrasi untuk mengadopsi proses kerja digital dan memperluas layanan berbasis teknologi. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa digitalisasi sering kali mengalami hambatan ketika diimplementasikan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal, termasuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Cordella & Tempini, 2015; Gil-Garcia et al., 2018). Tantangan tersebut terlihat pada ketimpangan literasi digital, resistensi perubahan, dan kegagalan inovasi digital dalam menyesuaikan diri dengan norma serta praktik sosial masyarakat setempat.

Dalam konteks Indonesia, muncul kebutuhan untuk mengembangkan digital governance yang tidak hanya berorientasi teknologi, tetapi juga berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang dapat memperkuat legitimasi birokrasi dan efektivitas layanan (Yuliani et al., 2021). Palangka Raya, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, menawarkan ruang analitis yang kaya melalui falsafah Huma Betang yang menekankan prinsip egalitarianisme, kebersamaan, harmoni, dan musyawarah. Falsafah ini selama beberapa dekade telah menjadi landasan etik serta identitas sosial masyarakat Dayak, namun belum banyak diteliti dalam kaitannya dengan digitalisasi birokrasi.

Kajian akademik mengenai integrasi nilai lokal ke dalam transformasi digital masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknokratis digitalisasi seperti interkoneksi sistem, efektivitas pelayanan, dan manajemen data (Dunleavy & Margetts, 2015). Sementara itu, riset yang mengkaji bagaimana nilai lokal bekerja sebagai logika institusional dalam proses digitalisasi masih jarang ditemukan, khususnya pada level pemerintah kota di Indonesia. Penelitian terbaru menekankan bahwa nilai lokal dapat memperkuat inovasi publik melalui peningkatan kepercayaan, kohesi sosial, dan adaptasi budaya dalam birokrasi (Prabowo, 2020; Nabatchi & Sancino, 2021). Hal ini membuka state of the art

bahwa integrasi nilai lokal dalam digital governance merupakan bidang kajian baru yang belum terjelajahi secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai Huma Betang diinternalisasikan dalam transformasi digital Pemerintah Kota Palangka Raya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi bentuk dan praktik digitalisasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; (2) memahami bagaimana nilai-nilai Huma Betang dipersepsi dan dioperasionalisasikan oleh ASN dalam konteks digital; dan (3) merumuskan model konseptual hubungan antara nilai lokal dan digitalisasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan perspektif nilai publik (Moore, 1995), teori logika institusional (Thornton et al., 2012), dan model Digital-Era Governance (Dunleavy et al., 2015) sebagai landasan teori untuk menjelaskan pola interaksi antara nilai lokal dan inovasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam literatur digital governance berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkaya wacana inovasi birokrasi di Indonesia yang lebih sensitif terhadap nilai budaya masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Konsep Digital Governance

Transformasi digital dalam administrasi publik menjadi isu sentral dalam tata kelola modern. Digital governance dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Mergel et al., 2019). Tren global menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak hanya menekankan pada efisiensi teknis, tetapi juga mendorong inovasi sosial dan interaksi kolaboratif antara pemerintah dan warga (UN, 2022).

Di Indonesia, agenda digitalisasi dicanangkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Implementasi SPBE menuntut birokrasi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menanamkan nilai pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan partisipatif (Kominfo, 2021).

Kendati demikian, sejumlah studi mencatat bahwa digitalisasi birokrasi masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kesenjangan literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya integrasi nilai sosial-budaya lokal dalam perumusan kebijakan (Dwiyanto, 2018; Nugroho, 2020). Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan baru yang menekankan penggabungan aspek teknis dan nilai budaya agar digitalisasi birokrasi tidak kehilangan dimensi kemanusiaan.

2.2. Huma Betang sebagai Indigenous Values Kalimantan Tengah

Konsep indigenous governance merujuk pada tata kelola berbasis kearifan lokal masyarakat adat yang menekankan nilai kolektifitas, solidaritas, dan keterhubungan manusia dengan lingkungan (Cornell & Kalt, 2010). Governance berbasis adat dipandang mampu memberikan alternatif terhadap model birokrasi modern yang sering kali terlalu teknokratis dan terlepas dari konteks sosial-budaya (Agrawal, 2005).

Dalam konteks Kalimantan Tengah, falsafah Huma Betang merupakan manifestasi nyata indigenous governance. Huma Betang, secara fisik merupakan rumah panjang masyarakat Dayak, namun secara filosofis mengandung nilai:

1. Kebersamaan dan kolektivitas, yakni hidup berdampingan dalam satu atap melambangkan toleransi dan solidaritas.
2. Demokrasi dan musyawarah, yakni setiap keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama.
3. Keadilan dan kesetaraan, yakni semua anggota komunitas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Gotong royong yakni kerja kolektif untuk kepentingan bersama.
5. Harmoni dengan alam, yakni tata hidup yang selaras dengan lingkungan (Sahrul & Bamba, 2021).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai Huma Betang masih relevan untuk diadaptasi dalam kebijakan publik modern. Huma Betang dapat menjadi model tata kelola inklusif yang menyeimbangkan kepentingan individu, komunitas, dan negara (Yulianti, 2022). Dalam konteks digital, Huma Betang berpotensi untuk dijadikan basis *platform deliberatif* dan *digital collaboration tools* yang memperkuat partisipasi warga dan ASN dalam pelayanan publik.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain intrinsic case study (Yin, 2014), untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana nilai-nilai Huma Betang diinternalisasikan dalam proses digitalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya. Desain studi kasus dipilih karena fokus pada pemahaman fenomena konteks-spesifik (digitalisasi birokrasi dan nilai lokal) dan interaksi kompleks antar aktor di dalam batasan organisasi pemerintahan kota.

Situs penelitian di Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk kantor-kantor dinas yang relevan (Dinas Komunikasi dan Informatika, Mall Pelayanan Publik, Bappedalitbang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta pertemuan dengan tokoh adat Dayak dan perwakilan masyarakat. Informan kunci adalah ASN yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan digital, pimpinan unit, pengelola layanan digital, tokoh adat, perwakilan masyarakat pengguna layanan digital, dan perwakilan LSM/akademisi lokal.

Teknik pengambilan responden dengan purposive sampling disertai snowball sampling untuk menangkap informan yang relevan dan berpengalaman. Kriteria inklusi: (a) bekerja di instansi/peran yang terlibat langsung dalam digitalisasi layanan; atau (b) tokoh adat/masyarakat yang aktif dalam mekanisme musyawarah lokal.

Fokus observasi penelitian pada tata letak ruang layanan digital, interaksi petugas-pengguna, proses alur layanan, penggunaan alat bantu digital, bukti integrasi budaya (simbol, bahasa, mekanisme musyawarah). Checklist observasi disediakan untuk konsistensi.

Untuk sumber data sekunder berupa dokumen: Peraturan daerah terkait SPBE, SOP layanan online, panduan internal e-office, rekaman rapat musyawarah elektronik, materi sosialisasi layanan digital, statistik penggunaan layanan. Semua dokumen dicatat dengan metadata (judul, tanggal, penanggung jawab).

Analisis mengikuti enam langkah thematic analysis Braun & Clarke (2006), terperinci sehingga bisa direplikasi:

1. Familiarisasi data: membaca ulang transkrip dan catatan lapangan, membuat memo awal;
2. Koding awal: menghasilkan kode-kode induk menggunakan NVivo;

tiap segmen diberi label kode deskriptif; 3. Mencari tema: mengelompokkan kode menjadi tema potensial yang relevan dengan pertanyaan penelitian; 4. Review tema: memeriksa kesesuaian tema terhadap data set; 5. Definisi dan penamaan tema: menuliskan definisi operasional tiap tema beserta contoh kutipan verbatim; 6. Pelaporan: menyusun narasi tematik yang menunjang argumen penelitian dan menghubungkannya dengan kerangka teori.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan berdasarkan analisis tematik dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen kebijakan digital Pemerintah Kota Palangka Raya. Terdapat empat tema utama: (1) Lanskap digitalisasi birokrasi; (2) Pemaknaan nilai Huma Betang oleh ASN; (3) Integrasi nilai lokal ke dalam praktik digitalisasi; dan (4) Tantangan serta faktor pendorong internalisasi nilai lokal.

1. Lanskap Digitalisasi Pemerintah Kota Palangka Raya

Transformasi digital di Kota Palangka Raya berkembang melalui sejumlah platform seperti e-Office, e-Planning, e-Budgeting, dan layanan aduan digital berbasis SP4N-LAPOR. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah menggunakan sistem digital untuk pelaporan dan komunikasi internal. Namun, tingkat pemanfaatan antar dinas belum merata.

Seorang informan di Dinas Kominfo mengatakan:

“Kalau bicara sistem, kami sudah siap. Tantangannya bukan teknologinya, tapi bagaimana semua unit punya cara kerja yang sama dan tidak kembali ke pola manual.” (Informan A, 05/11/2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun “cangkang” birokrasi telah mendigital, “isi” atau kultur kerjanya masih mengalami tarikan gravitasi ke arah pola manual yang konvensional. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) antar-organisasi perangkat daerah, yang menuntut adanya strategi harmonisasi tata kelola yang lebih dari sekadar pendekatan teknokratis.

Lebih jauh, fenomena “tarikan gravitasi” ke arah pola manual ini menciptakan kondisi yang dapat disebut sebagai pseudo-digitalisasi di beberapa lini layanan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa meskipun kanal pelaporan dan output akhir telah berbasis elektronik, proses hulu (input dan pemrosesan data) sering kali

masih dilakukan secara konvensional atau double-entry. Hal ini mengakibatkan redundansi pekerjaan yang justru membebani aparatur, alih-alih meringankannya. Ketidaksiapan budaya kerja ini diperparah oleh fragmentasi kebijakan antar-dinas, di mana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) cenderung berjalan dengan kecepatan adaptasi yang berbeda-beda. Akibatnya, integrasi data yang menjadi tujuan utama SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terhambat oleh tembok-tembok ego sektoral dan perbedaan standar operasional yang belum terharmonisasi.

Disparitas ini tidak hanya terjadi pada level kelembagaan, tetapi juga pada level individu aparatur. Penelitian menemukan bahwa tantangan krusial dalam lanskap digitalisasi di Kota Palangka Raya adalah tingkat literasi digital yang belum merata di kalangan ASN. Terdapat kesenjangan kompetensi yang nyata antara aparatur yang adaptif terhadap teknologi dengan mereka yang resisten terhadap perubahan. Kelompok yang resisten ini cenderung memandang digitalisasi sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai instrumen strategis untuk melayani publik. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi semata (*hardware dan software*) tidak secara otomatis menjamin terjadinya transformasi birokrasi, apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (*brainware*) yang memadai.

Selain masalah literasi dan resistensi, hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran juga menjadi faktor determinan yang mempengaruhi konsistensi implementasi sistem digital. Beberapa unit layanan mengalami kendala dalam pemeliharaan perangkat dan pembaruan sistem, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk kembali menggunakan metode manual sebagai solusi pragmatis.

Dinamika ini menunjukkan bahwa lanskap digitalisasi birokrasi di Pemerintah Kota Palangka Raya masih berada dalam fase transisi yang rentan. Tanpa adanya intervensi nilai yang kuat untuk menyatukan visi dan pola tindak, digitalisasi berisiko terjebak pada formalitas administratif belaka. Oleh karena itu, temuan ini menjadi landasan argumentasi mengapa internalisasi nilai lokal seperti Huma Betang menjadi relevan dan mendesak untuk mengisi kekosongan "jiwa" dalam transformasi digital yang sedang berlangsung.

2. Pemaknaan Nilai Huma Betang oleh ASN

Dalam merespons dinamika perubahan budaya kerja akibat digitalisasi, nilai-nilai lokal tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap simbolik, melainkan bertransformasi menjadi jangkar etis (ethical anchor) yang menstabilkan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Temuan penelitian mengungkap bahwa mayoritas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya telah melampaui pemahaman Huma Betang sebagai artefak fisik (rumah panjang) semata. Dalam kognisi mereka, Huma Betang dimaknai secara mendalam sebagai sebuah sistem tata nilai kehidupan (way of life) yang mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti handep (gotong royong/kebersamaan yang saling menguatkan), hatamuei (semangat musyawarah dan memuliakan tamu), kesetaraan derajat, serta harmoni sosial.

Konstruksi pemaknaan kognitif ini memiliki implikasi serius terhadap cara pandang birokrasi dalam menyikapi transformasi digital. Di banyak tempat, digitalisasi sering kali membawa risiko elitisme teknokratis, di mana layanan publik menjadi berjarak dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki privilege teknologi. Namun, di Palangka Raya, internalisasi nilai Huma Betang justru bekerja sebagai kontra-narasi terhadap potensi eksklusi tersebut. Nilai ini mendorong ASN untuk mempertahankan prinsip egalitarianisme bahwa setiap warga, terlepas dari kemampuan teknologinya, berhak mendapatkan perlakuan dan akses yang setara dalam "rumah besar" pelayanan publik.

Salah satu ASN memberikan pernyataan reflektif yang menggambarkan bagaimana filosofi ini terwujud dalam etos kerja pelayanan:

“Kami diajarkan bahwa semua orang itu setara. Jadi dalam layanan digital, kami berusaha tidak membuat jarak dengan masyarakat, baik yang melek teknologi maupun yang belum.” (Informan B, 05/11/2025).

Narasi ini menegaskan bahwa bagi ASN, teknologi hanyalah alat (tool), sedangkan spirit pelayanannya tetap berakar pada filosofi kemanusiaan Huma Betang. Internalisasi nilai kesetaraan ini mencegah terjadinya dehumanisasi pelayanan akibat penggunaan mesin dan aplikasi. Konsekuensi praktis dari pemaknaan ini sangat signifikan: munculnya inisiatif birokrasi untuk menerapkan model layanan hibrida (hybrid services).

Model hibrida ini bukanlah tanda kegagalan digitalisasi, melainkan sebuah kearifan adaptif. ASN menyadari bahwa memaksakan layanan full-online tanpa memandang kesiapan warga adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai kebersamaan (handep). Oleh karena itu, kombinasi antara kanal digital dan layanan tatap muka tetap dipertahankan guna memastikan prinsip "tidak ada warga yang tertinggal" (no one left behind) dapat terwujud. Dengan demikian, Huma Betang berfungsi sebagai filter kognitif yang memastikan transformasi digital di Kota Palangka Raya tetap inklusif, humanis, dan berpijakan pada realitas sosiologis masyarakat setempat.\

3. Praktik Integrasi Nilai Huma Betang dalam Digitalisasi

Integrasi nilai lokal ditemukan pada tiga aspek: desain layanan digital, komunikasi organisasi, dan partisipasi publik. Layanan digital seperti antrean online dan permohonan perizinan dibuat dengan bahasa yang sederhana, dan beberapa unit menambahkan panduan visual agar lebih mudah diikuti oleh masyarakat dengan literasi digital rendah. Observasi di Dinas Pelayanan Terpadu menunjukkan adanya "Meja Bantuan Digital" untuk masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi.

Beberapa perangkat daerah memanfaatkan forum diskusi daring sebagai tempat menyerap aspirasi sebelum merumuskan SOP digital. Proses ini merupakan adaptasi nilai musyawarah dalam konteks digital.

"Rapat internal memang online, tapi pola kita tetap musyawarah.

Semua pendapat didengar dulu sebelum keputusan dibuat."

(Informan C, 19/10/2025).

ASN menghindari penggunaan bahasa formal yang kaku dalam pengumuman digital demi membangun hubungan yang lebih humanizing. Fenomena pergeseran pola komunikasi dari gaya instruksi yang kaku menuju gaya interaksi yang lebih cair tersebut menandakan adanya upaya de-birokratisasi bahasa dalam ruang digital. Dalam kultur Huma Betang, komunikasi yang efektif dibangun di atas rasa kesetaraan dan persaudaraan, bukan pada hierarki kekuasaan. Oleh karena itu, ketika ASN menggunakan bahasa yang lebih humanizing dalam kanal

pengumuman digital atau media sosial dinas, mereka sejatinya sedang mereplikasi atmosfer "duduk bersama" di rumah panjang ke dalam layar gawai masyarakat. Pendekatan ini terbukti ampuh meruntuhkan stigma bahwa pemerintah adalah entitas yang dingin dan berjarak, sekaligus membangun kepercayaan publik (trust) bahwa transformasi digital yang dilakukan tidak bertujuan untuk mempersulit, melainkan untuk melayani.

Lebih jauh, keberadaan "Meja Bantuan Digital" di Dinas Pelayanan Terpadu menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana birokrasi mendefinisikan efisiensi. Dalam logika teknokrasi murni, keberadaan bantuan manual dalam sistem digital sering dianggap sebagai inefisiensi atau kegagalan sistem. Namun, dalam optik nilai Huma Betang, fasilitas ini adalah manifestasi konkret dari prinsip tanggung jawab komunal. Pemerintah Kota Palangka Raya menyadari bahwa membiarkan warga yang gagap teknologi berjuang sendirian melawan algoritma aplikasi adalah bentuk pengabaian yang bertentangan dengan nilai handep (gotong royong). Meja bantuan tersebut bukan sekadar pos teknis, melainkan jembatan sosiologis yang memastikan bahwa migrasi ke sistem digital tidak meninggalkan kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah di belakang. Ini menegaskan bahwa inklusivitas layanan diprioritaskan di atas kecepatan proses semata.

Praktik adaptasi nilai musyawarah dalam perumusan SOP digital juga menunjukkan kedewasaan birokrasi dalam mengelola perubahan. Transisi forum diskusi dari ruang rapat fisik ke platform daring tidak menghilangkan esensi hatamuei (saling berkunjung/bertukar pikiran). Justru, teknologi dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan partisipasi yang sebelumnya terbatas oleh sekat ruang dan waktu. Ketika aspirasi masyarakat diserap melalui forum daring sebelum sebuah kebijakan digital disahkan, birokrasi sedang menjalankan mandat budaya bahwa "keputusan yang baik adalah keputusan yang disepakati bersama". Hal ini meminimalisir potensi resistensi publik di kemudian hari, karena masyarakat merasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap sistem yang dibangun.

Dengan demikian, integrasi nilai Huma Betang dalam praktik digitalisasi di Kota Palangka Raya tidak berhenti pada simbolisasi artifisial, tetapi telah merasuk ke dalam arsitektur layanan. Sinergi antara desain antarmuka yang ramah

pengguna, pola komunikasi yang egaliter, serta mekanisme umpan balik yang partisipatif, membentuk sebuah model Digital Governance yang khas: modern dalam teknologi, namun tetap tradisional dalam nilai pelayanannya. Praktik ini membuktikan bahwa kearifan lokal bukanlah antitesis dari kemajuan teknologi, melainkan fondasi moral yang menjaga transformasi digital tetap berwajah manusiawi.

4. Tantangan Integrasi Nilai Lokal

Tantangan meliputi literasi digital yang belum merata, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, serta fragmentasi kebijakan antar dinas. Selain itu, nilai lokal terkadang dipahami secara normatif tanpa pedoman operasional yang jelas.

“Semua bilang Huma Betang, tapi apakah ada SOP-nya dalam digitalisasi? Belum ada. Jadi kita menginterpretasikan sendiri.” (Informan D, 13/10/2025).

Sementara itu faktor pendorong mencakup kepemimpinan yang mendukung inovasi, modal sosial masyarakat Dayak, dan kolaborasi dengan lembaga adat.

Ketiadaan kodifikasi formal nilai Huma Betang ke dalam prosedur standar operasional (SOP) digital menciptakan sebuah ambiguitas implementatif. Sebagaimana disoroti oleh Informan D, ketika nilai-nilai luhur hanya berhenti pada tataran jargon lisian tanpa diterjemahkan ke dalam instrumen teknis yang mengikat, maka interpretasi terhadap nilai tersebut menjadi sangat subjektif dan bergantung pada preferensi masing-masing individu aparatur. Akibatnya, terjadi disparitas kualitas layanan; satu unit mungkin sangat akomodatif dan humanis karena pimpinannya memiliki pemahaman budaya yang kuat, sementara unit lain tetap kaku dan teknokratis karena ketiadaan panduan yang memaksa mereka untuk beradaptasi. Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam internalisasi nilai lokal bukanlah pada tataran penerimaan filosofis, melainkan pada operasionalisasi teknis. Tanpa adanya "SOP Budaya" yang jelas, integrasi Huma

Betang dalam digitalisasi berisiko terjebak menjadi retorika politik semata, alih-alih menjadi standar pelayanan publik yang terukur.

Di sisi lain, hambatan struktural berupa fragmentasi kebijakan antar-dinas atau yang sering disebut sebagai ego sektoral, justru menjadi antitesis dari nilai Handep (kebersamaan) itu sendiri. Ironisnya, birokrasi yang mencoba mengampanyekan nilai "satu rumah" (Huma Betang) justru sering kali bekerja dalam "kamar-kamar" aplikasi yang terpisah dan tidak terintegrasi. Hal ini memperumit pengalaman pengguna layanan dan menghambat terciptanya ekosistem data yang terpadu. Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat terutama kelompok lansia dan masyarakat pinggiran menjadi tembok penghalang yang nyata. Resistensi terhadap perubahan tidak hanya muncul dari internal birokrasi yang enggan meninggalkan zona nyaman manual, tetapi juga dari masyarakat yang merasa teralienasi oleh percepatan teknologi yang tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.

Namun, di tengah himpitan tantangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya modal sosial (*social capital*) yang kuat sebagai faktor pendorong keberhasilan transformasi. Struktur masyarakat Dayak yang komunal dan patuh pada adat menjadi aset berharga. Kolaborasi antara pemerintah kota dengan lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan kepercayaan. Ketika tokoh adat dilibatkan untuk mensosialisasikan program digitalisasi menggunakan bahasa dan pendekatan kultural, resistensi masyarakat cenderung menurun signifikan. Lembaga adat berfungsi sebagai penerjemah kultural (*cultural brokers*) yang memvalidasi bahwa teknologi baru tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai leluhur, melainkan justru memperkuat prinsip musyawarah dan keterbukaan.

Selain itu, faktor kepemimpinan transformasional (*supportive leadership*) di level pimpinan daerah memberikan energi positif bagi inovasi. Komitmen pimpinan untuk terus mendorong digitalisasi yang berbasis kearifan lokal memberikan legitimasi bagi ASN untuk berimprovisasi dan mencari format layanan terbaik yang menggabungkan efisiensi mesin dengan kehangatan budaya.

Dengan demikian, dinamika internalisasi nilai lokal dalam digitalisasi di Kota Palangka Raya dapat digambarkan sebagai sebuah dialektika yang terus-menerus

antara tuntutan standarisasi teknis melawan fleksibilitas budaya. Keberhasilan jangka panjang dari transformasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk mengubah nilai-nilai implisit Huma Betang menjadi kebijakan eksplisit, serta meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral demi mewujudkan birokrasi yang benar-benar "hidup dalam satu rumah" digital yang inklusif.

4.2. Pembahasan

Pembahasan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teori: Public Value, Institutional Logics, dan Digital Governance.

1. Digitalisasi Birokrasi sebagai Arena Produksi Nilai Publik

Mengacu pada Moore (1995), digitalisasi dalam sektor publik tidak boleh direduksi sekadar sebagai upaya teknokratis untuk mengejar efisiensi biaya atau kecepatan proses semata. Lebih dari itu, transformasi digital merupakan arena strategis bagi penciptaan nilai publik (*public value creation*). Dalam kerangka ini, keberhasilan digitalisasi tidak diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibangun, melainkan seberapa besar teknologi tersebut mampu menjawab kebutuhan warga, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan keadilan sosial. Temuan penelitian di Kota Palangka Raya memberikan bukti empiris yang kuat bahwa pemerintah kota sedang berupaya menggeser paradigma digitalisasinya: dari sekadar government-centered yang berorientasi pada kemudahan birokrasi menuju citizen-centered yang berorientasi pada kebutuhan warga yang inklusif.

Secara spesifik, integrasi nilai Huma Betang khususnya prinsip kesetaraan dan kebersamaan (handep) telah mengubah wajah digitalisasi birokrasi menjadi lebih humanis. Jika dalam teori klasik difusi inovasi sering kali menciptakan kesenjangan baru (*digital divide*) antara mereka yang melek teknologi dan yang tidak, pendekatan Pemerintah Kota Palangka Raya justru menggunakan nilai lokal sebagai mekanisme penyeimbang. Praktik penyediaan layanan hibrida dan fasilitas pendampingan manual seperti "Meja Bantuan Digital" di MPP adalah manifestasi nyata dari produksi nilai publik berupa keadilan akses (*equity*). Dalam perspektif Moore, ini adalah bentuk operational capacity yang dikerahkan untuk memastikan

bahwa mandat *political standing* yakni melayani seluruh warga tanpa terkecuali agar tetap terjaga di era algoritma. Birokrasi tidak membiarkan warga yang rentan tertinggal oleh laju teknologi, sebuah sikap etis yang berakar kuat pada filosofi rumah panjang di mana setiap penghuni memiliki hak yang setara di bawah satu atap.

Lebih jauh, temuan ini mengonfirmasi dan memperluas argumen Nabatchi & Sancino (2021) yang menyatakan bahwa nilai budaya dapat memperkuat legitimasi inovasi publik. Dalam konteks Palangka Raya, legitimasi budaya menjadi kunci penerimaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ketika fitur-fitur digital disosialisasikan atau didesain dengan nuansa yang familiar seperti penggunaan istilah lokal atau mekanisme musyawarah daring yang mengadopsi pola hatamuei teknologi tersebut tidak lagi dipandang sebagai benda asing yang mengancam. Sebaliknya, ia diterima sebagai evolusi alat bantu yang selaras dengan norma sosial yang berlaku.

Nilai Huma Betang bertindak sebagai "jembatan kognitif" yang menghubungkan rasionalitas birokrasi modern dengan rasionalitas budaya masyarakat Dayak. Tanpa jembatan nilai ini, digitalisasi berpotensi mengalami resistensi atau penolakan karena dianggap mencabut akar interaksi sosial yang selama ini dihargai oleh masyarakat. Namun, produksi nilai publik ini bukan tanpa tantangan. Analisis terhadap disparitas implementasi antar-dinas menunjukkan bahwa penciptaan nilai publik di Kota Palangka Raya masih bersifat fragmentaris.

Moore (1995) menekankan bahwa penciptaan nilai publik memerlukan keselarasan antara tiga elemen strategis: nilai yang dituju, legitimasi politik, dan kapasitas operasional. Dalam kasus ini, meskipun nilai yang dituju yakni inklusivitas Huma Betang) sudah jelas dan legitimasi politik/budaya cukup kuat, kapasitas operasional berupa infrastruktur SDM dan SOP yang masih menjadi titik lemah. Ketiadaan standardisasi dalam menerjemahkan nilai lokal ke dalam prosedur teknis menyebabkan "nilai publik" yang dirasakan masyarakat menjadi tidak merata tergantung pada unit mana mereka berinteraksi. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya adalah melembagakan (*institutionalizing*) nilai-nilai inklusif Huma Betang ini ke dalam sistem algoritma

dan regulasi yang baku, sehingga produksi nilai publik tidak lagi bergantung pada inisiatif parsial, melainkan menjadi luaran sistemik dari birokrasi digital itu sendiri.

Dengan demikian, digitalisasi di Kota Palangka Raya membuktikan bahwa teknologi dan budaya lokal bukanlah entitas yang saling menegasikan. Justru, sintesis keduanya menciptakan varian baru dari tata kelola pemerintahan: sebuah birokrasi digital yang berkarakter, di mana efisiensi teknologi tunduk pada imperatif moral untuk memanusiakan warga, sebagaimana diajarkan dalam falsafah Huma Betang.

2. Nilai Lokal sebagai Logika Institusional dalam Transformasi Digital

Teori Institutional Logics yang dikembangkan oleh Thornton et al. (2012) memberikan kerangka analitis yang tajam untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya beroperasi dalam struktur organisasi modern. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dibentuk oleh aturan formal atau tekanan efisiensi pasar, melainkan juga oleh sistem simbol dan praktik material yang berakar secara sosial. Temuan di Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan bahwa Huma Betang tidak sekadar hadir sebagai ornamen budaya, melainkan berfungsi sebagai logika dominan (*dominant logic*) yang bersanding dan terkadang bersaing dengan logika teknokratis birokrasi.

Secara tradisional, transformasi digital sering kali didorong oleh logika teknokratis yang mengagungkan efisiensi, kecepatan, dan standardisasi impersonal. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa ASN di Palangka Raya melakukan proses hibridasi logika. Mereka tidak meninggalkan logika efisiensi digital, tetapi membungkusnya dalam logika budaya Huma Betang. Sebagai contoh, ketika platform komunikasi digital diadopsi, logika teknokratis mungkin menuntut respons otomatis dan singkat. Namun, logika Huma Betang mengintervensi proses tersebut dengan menuntut adanya sentuhan personal dan bahasa yang memanusiakan (*humanizing*), sebagaimana tercermin dalam praktik komunikasi publik dinas yang cair dan egaliter.

Dalam hal ini, Huma Betang bertindak sebagai pedoman perilaku (*behavioral script*) bagi ASN saat menghadapi situasi ambiguitas dalam layanan digital. Ketika dihadapkan pada pilihan antara "kepatuhan kaku pada prosedur

aplikasi" (logika birokrasi) atau "membantu warga yang kesulitan login" (logika kebersamaan/Handep), ASN cenderung mengambil jalan tengah yang dipengaruhi oleh nilai lokal tersebut. Fasilitas "Meja Bantuan Digital" di MPP adalah bukti fisik dari bekerjanya logika institusional ini; ia adalah kompromi struktural yang memungkinkan efisiensi digital tetap berjalan tanpa melanggar norma tolong-menolong yang dijunjung tinggi masyarakat Dayak.

Lebih lanjut, praktik musyawarah digital (*online deliberation*) yang ditemukan dalam perumusan kebijakan teknis merupakan manifestasi dari logika Hatamuei. Dalam logika murni sistem informasi, keputusan sering kali bersifat top-down berdasarkan analisis data. Namun, di Palangka Raya, proses tersebut dimodifikasi melalui mekanisme dengar pendapat daring yang mereplikasi tradisi musyawarah rumah panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak mengubah struktur sosial masyarakat menjadi individualis, melainkan struktur sosial (nilai musyawarah) yang "menjinakkan" teknologi agar sesuai dengan pola interaksi komunal.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya state of the art kajian digital governance. Sebagaimana dicatat oleh Cordella & Tempini (2020), sebagian besar literatur digitalisasi pemerintah masih terjebak pada pendekatan sosio-teknis yang memandang teknologi sebagai variabel independen yang mengubah organisasi. Penelitian ini membantah determinisme teknologi tersebut dengan menunjukkan bukti empiris sebaliknya: bahwa nilai lokal (local embeddedness) memiliki daya tawar yang kuat untuk membentuk ulang (reshape) artefak teknologi.

Studi ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini jarang menyoroti peran nilai lokal pada level pemerintah daerah, khususnya di luar konteks Barat. Jika penelitian terdahulu sering menempatkan budaya lokal sebagai hambatan (*barrier*) bagi modernisasi, penelitian ini justru membuktikan bahwa Huma Betang berfungsi sebagai katalisator penerimaan. Dengan menjadikan nilai lokal sebagai logika institusional, transformasi digital di Palangka Raya memperoleh legitimasi moral yang tidak bisa didapatkan hanya melalui regulasi formal. Artinya, integrasi nilai lokal bukan tanda kemunduran menuju tradisionalisme, melainkan strategi

cerdas untuk menciptakan birokrasi digital yang tangguh (*resilient*) dan responsif terhadap konteks sosial penggunanya.

Dengan demikian, transformasi digital di Kota Palangka Raya bukan merupakan proses penggantian "nilai lama" dengan "teknologi baru", melainkan sebuah proses ko-evolusi. Logika Huma Betang memberikan "jiwa" pada "raga" digital birokrasi, memastikan bahwa di balik layar monitor dan deretan kode algoritma, tetap terdapat wajah pemerintah yang melayani dengan semangat persaudaraan.

3. Praktik Digital Governance yang Sensitif Konteks

Dalam diskursus administrasi publik kontemporer, model Digital Era Governance (DEG) yang dipopulerkan oleh Dunleavy et al. (2015) menekankan tiga elemen kunci: reintegrasi yakni menyatukan kembali layanan yang terfragmentasi, holisme berbasis kebutuhan berupa layanan yang berpusat pada pengguna dan digitalisasi proses administratif. Namun, implementasi DEG sering kali terjebak pada determinisme teknologi, di mana pemerintah daerah berlomba-lomba mengadopsi aplikasi canggih tanpa memperhitungkan ekosistem sosial tempat teknologi tersebut mendarat.

Dalam konteks Pemerintah Kota Palangka Raya, penelitian ini menemukan sebuah varian unik dari praktik Digital Governance. Digitalisasi di kota ini tidak berjalan sebagai mesin penggilas yang memaksa masyarakat untuk serta-merta berubah, melainkan beroperasi melalui mekanisme adaptasi sosio-teknikal. Temuan mengenai keberadaan “Meja Bantuan Digital” di Dinas Pelayanan Terpadu dan inisiatif forum musyawarah daring merupakan bukti empiris bahwa birokrasi sedang melakukan proses re-integrasi sosial.

Secara teoretis, Dunleavy menekankan reintegrasi pada level sistem IT dan struktur organisasi. Namun, kasus Palangka Raya memperluas definisi tersebut. Re-integrasi di sini dimaknai sebagai upaya menyatukan kembali warga yang “terputus” (*disconnected*) akibat kesenjangan literasi digital ke dalam sistem layanan negara. “Meja Bantuan Digital” bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan sebuah intervensi institusional untuk mencegah terjadinya eksklusi digital. Fasilitas ini mengakui realitas bahwa tidak semua warga memiliki modal kultural dan teknis

yang sama untuk mengakses negara secara virtual. Dengan menyediakan jembatan manusia sebagai petugas bantuan di tengah sistem digital, pemerintah kota menunjukkan sensitivitas konteks yang tinggi: bahwa efisiensi digital tidak boleh dicapai dengan mengorbankan aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, transformasi forum musyawarah ke dalam bentuk daring menunjukkan bagaimana teknologi digital diadopsi tanpa mencabut akar tradisi deliberatif masyarakat. Alih-alih menggantikan musyawarah dengan sistem voting atau keputusan algoritma sepihak, teknologi digunakan sebagai medium baru untuk melestarikan nilai lama (Hatamuei). Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai kontinuitas budaya dalam perubahan teknologi. Proses digitalisasi layanan tidak dirasakan sebagai disruptif yang asing, melainkan sebagai evolusi alamiah dari cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintahnya.

Temuan ini secara kuat mengonfirmasi argumen Gil-Garcia et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan digital government sangat bergantung pada kemampuan pembuat kebijakan untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya setempat. Digitalisasi yang sensitif konteks (*context-sensitive digitization*) terbukti lebih sukses meningkatkan kualitas layanan karena mampu memitigasi resistensi. Ketika prosedur digital dirancang selaras dengan norma sosial misalnya dengan tetap menyediakan ruang negosiasi atau pendampingan personal yakni tingkat kepercayaan publik terhadap sistem tersebut meningkat.

Sebaliknya, kegagalan banyak proyek e-government di negara berkembang sering kali disebabkan oleh "kebutaan konteks" (*contextual blindness*), di mana model layanan dari negara maju atau kota metropolitan diadopsi mentah-mentah tanpa penyesuaian. Palangka Raya menghindari jebakan ini dengan menjadikan nilai lokal sebagai filter adaptasi.

Oleh karena itu, model Digital Governance yang berkembang di Palangka Raya dapat dikonseptualisasikan sebagai *Collaborative-Adaptive Digital Governance*. Model ini tidak hanya berfokus pada kecanggihan infrastruktur (hardware/software), tetapi memprioritaskan kesiapan sosial (*social readiness*) dan kenyamanan budaya (*cultural comfort*). Implikasi dari temuan ini sangat jelas: untuk meningkatkan efektivitas layanan publik di daerah dengan karakteristik budaya yang kuat, strategi digitalisasi harus bergeser dari pendekatan "teknologi-

dulu" (*technology-first*) menjadi pendekatan "konteks-dulu" (*context-first*). Teknologi harus dibentuk (*shaped*) oleh kebutuhan dan nilai masyarakat, bukan sebaliknya.

4. Tantangan Integrasi dan Kebutuhan Standarisasi Budaya

Temuan penelitian ini menyingkap sebuah paradoks krusial dalam transformasi digital di Palangka Raya: meskipun nilai Huma Betang diakui secara universal sebagai filosofi moral birokrasi, penerapannya di lapangan sangat terfragmentasi dan bergantung pada aktor (actor-dependent). Integrasi nilai lokal saat ini lebih banyak didorong oleh diskresi individual pimpinan atau inisiatif personal ASN yang memiliki kesadaran budaya tinggi, bukan oleh mekanisme sistemik yang mengikat. Fenomena ini menciptakan kerentanan institusional; ketika aktor-aktor kunci tersebut bermutasi atau pensiun, keberlanjutan praktik layanan digital yang humanis dan berbudaya menjadi terancam. Tanpa adanya pelembagaan (institutionalization), inovasi berbasis nilai lokal hanya akan menjadi artefak sejarah kepemimpinan tertentu, alih-alih menjadi budaya organisasi yang permanen.

Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan formal yang mampu menerjemahkan nilai-nilai abstrak Huma Betang ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) digital yang konkret dan terukur. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan nilai lokal sering kali hanya hidup sebagai jargon politik atau prinsip retoris dalam pidato-pidato seremonial, namun kehilangan daya paksa dalam operasional sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh temuan lapangan, ASN sering kali harus "menginterpretasikan sendiri" bagaimana menerapkan nilai kebersamaan atau musyawarah dalam konteks aplikasi digital. Hal ini membuka ruang bagi inkonsistensi layanan; satu dinas mungkin menerjemahkan Handep sebagai kewajiban membantu warga mengisi formulir, sementara dinas lain mungkin menganggapnya tidak relevan dengan tupoksi teknis mereka.

Dalam perspektif administrasi publik modern, standardisasi budaya (cultural standardization) bukanlah upaya untuk mematikan kreativitas, melainkan strategi untuk menjamin kepastian layanan (legal certainty). Pemerintah Kota

Palangka Raya perlu menyusun regulasi turunan dari SPBE yang secara eksplisit memuat indikator budaya. Misalnya, nilai Hatamuei (memuliakan tamu/musyawarah) tidak boleh lagi hanya dipahami sebagai etika ramah tamah, tetapi harus dikodifikasikan menjadi protokol wajib dalam penanganan pengaduan digital seperti penetapan batas waktu respons (response time) yang cepat dan kewajiban memberikan umpan balik yang empatik kepada pelapor.

Lebih jauh, standarisasi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol kualitas (quality assurance). Dengan adanya SOP yang mengintegrasikan nilai budaya, kinerja ASN tidak hanya dinilai berdasarkan seberapa cepat mereka menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga seberapa baik mereka mempraktikkan nilai-nilai inklusivitas dalam interaksi digital. Tanpa intervensi regulasi ini, digitalisasi berisiko terjebak pada formalisme kosong: sistemnya canggih, namun interaksinya kering dan kehilangan sentuhan kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Dayak.

Oleh karena itu, tantangan terbesar ke depan bukan lagi pada tataran "adopsi teknologi", melainkan pada "adopsi nilai ke dalam teknologi". Pemerintah Kota dituntut untuk bergerak dari fase sosialisasi nilai menuju fase kodifikasi nilai. Hanya dengan cara inilah, Huma Betang dapat bertransformasi dari sekadar "falsafah hidup" menjadi "logika kerja" birokrasi yang sistematis, menjamin bahwa setiap klik dan ketukan jari di layar gawai pemerintah benar-benar mencerminkan semangat rumah besar yang mengayomi seluruh warga.

5. Model Konvergensi Digital–Nilai Lokal

Sebagai sintesis akhir dari analisis tematik dan diskusi teoretis yang telah dipaparkan, penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual baru yang disebut sebagai Model Konvergensi Digital–Nilai Lokal. Model ini menolak pandangan biner yang mempertentangkan antara modernitas digital dengan tradisionalitas budaya. Sebaliknya, model ini menawarkan perspektif integratif di mana teknologi digital dan nilai kearifan lokal berinteraksi secara dialektis untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih tangguh. Berdasarkan temuan

empiris di Kota Palangka Raya, model konvergensi ini dibangun di atas tiga pilar elemen strategis yang saling menopang.

Pertama, Value-grounded Service Design (Desain Layanan Berbasis Nilai). Elemen ini menempatkan nilai lokal sebagai fondasi ontologis dalam perancangan arsitektur layanan publik. Dalam model ini, efisiensi teknis bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan desain aplikasi. Desain layanan harus mengakomodasi nilai inklusivitas dan handep (tolong-menolong). Manifestasi konkret dari elemen ini terlihat pada keputusan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempertahankan layanan hibrida dan menyediakan "Meja Bantuan Digital". Ini membuktikan bahwa desain sistem tidak boleh bersifat deterministik memaksa pengguna, melainkan harus empatik terhadap realitas sosial masyarakat yang beragam. Value-grounded design memastikan bahwa teknologi melayani manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya, bukan mereduksi manusia menjadi sekadar data input.

Kedua, Cultural-driven Digital Communication (Komunikasi Digital Berbasis Budaya). Elemen ini menekankan pentingnya penggunaan narasi dan simbol budaya dalam interaksi antara mesin birokrasi dan warga. Transformasi digital sering kali menciptakan alienasi karena hilangnya sentuhan personal. Model ini mengatasi hal tersebut dengan mengadopsi gaya komunikasi yang egaliter dan humanizing, yang berakar pada etika pergaulan masyarakat Dayak. Penggunaan bahasa yang tidak kaku, sapaan yang akrab, dan responsivitas yang mencerminkan keramahtamahan adat menjadi kunci untuk membangun trust. Dalam konteks ini, budaya berfungsi sebagai "antarmuka lunak" (soft interface) yang membungkus kekakuan sistem algoritma, sehingga negara tetap hadir sebagai entitas yang hangat dan mudah didekati oleh warganya.

Ketiga, Participatory Digital Governance Berbasis Musyawarah. Elemen terakhir dan paling krusial adalah transformasi mekanisme partisipasi publik. Model ini tidak sekadar memindahkan kotak saran ke dalam bentuk formulir online, melainkan mendigitalkan semangat musyawarah (Hatamuei). Teknologi digunakan untuk memfasilitasi deliberasi kolektif, di mana keputusan kebijakan tidak diambil secara teknokratis sepihak, tetapi melalui proses diskursus daring yang melibatkan representasi masyarakat adat dan tokoh lokal. Ini mengubah posisi warga dari sekadar "konsumen layanan" menjadi "rekanan kolaboratif" (*collaborative*

partners) dalam pembangunan, sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang telah lama hidup dalam tradisi rumah panjang.

Secara keseluruhan, model Konvergensi Digital–Nilai Lokal ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi literatur digital governance. Ia mengisi kekosongan akademik yang selama ini didominasi oleh pendekatan teknis-manajerial, dengan menawarkan pendekatan sosio-kultural. Model ini menegaskan bahwa keberlanjutan transformasi digital di negara berkembang tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang diadopsi, melainkan seberapa dalam teknologi tersebut mampu berakar pada nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, model ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya untuk merancang strategi digitalisasi yang tidak mencabut masyarakat dari akar budayanya.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik di Kota Palangka Raya hanya dapat berjalan efektif apabila diintegrasikan dengan local values, khususnya nilai-nilai kearifan lokal Dayak yang menjadi basis budaya masyarakat. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa digitalisasi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi persoalan penerimaan sosial, modal budaya, dan rekonstruksi relasi birokrasi-masyarakat.

Tiga kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Local values berfungsi sebagai jembatan kepercayaan (trust bridge) antara birokrasi dan masyarakat dalam proses digitalisasi. Nilai Huma Betang seperti kebersamaan, musyawarah, dan kepedulian komunal memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital yang sebelumnya dianggap rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
2. Digitalisasi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan ketika dibungkus melalui strategi komunikasi budaya. Praktik seperti menghadirkan mantir adat sebagai fasilitator, penggunaan narasi adat dalam sosialisasi aplikasi, serta pola penyampaian informasi berbasis komunitas terbukti menurunkan resistensi dan meningkatkan partisipasi pengguna.
3. Integrasi *local values* menghasilkan model tata kelola digital yang lebih adaptif. Birokrasi tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga menyesuaikannya dengan konteks sosial-budaya lokal. Model ini menempatkan pemerintah sebagai cultural enabler, bukan hanya technology provider. Dengan demikian, digitalisasi tidak berjalan secara top-down, melainkan melalui proses kolaboratif yang menghargai identitas masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang digital governance berbasis kearifan lokal, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks negara-negara maju. Penelitian ini menegaskan bahwa local values bukan

hambatan bagi digital transformation, tetapi justru modal sosial yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan digital.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk: Mengembangkan desain layanan digital berbasis budaya, termasuk bahasa, simbol, dan mekanisme partisipasi; Memperkuat peran lembaga adat dalam sosialisasi digitalisasi; Membangun platform digital yang adaptif terhadap konteks geografis dan sosiologis masyarakat lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus yang hanya berfokus pada Palangka Raya, sehingga penelitian lanjutan dapat melakukan perbandingan antarwilayah yang memiliki variasi nilai budaya berbeda di Kalimantan atau Indonesia secara umum. Meski demikian, temuan penelitian ini memberikan dasar konseptual dan praktis yang kuat bahwa digitalisasi yang berakar pada nilai lokal merupakan jalan strategis untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis dan praktis yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, praktisi pelayanan publik, serta akademisi untuk pengembangan lebih lanjut. Saran-saran ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya (Aspek Kebijakan Praktis) Mengingat temuan bahwa integrasi nilai lokal saat ini masih bergantung pada interpretasi individu dan belum terstandarisasi, disarankan agar Pemerintah Kota:

- Formalisasi Regulasi SPBE Berbasis Budaya: Perlu segera menyusun regulasi turunan (seperti Peraturan Walikota atau Keputusan Kepala Daerah) yang secara eksplisit memasukkan indikator kearifan lokal dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan digital. Regulasi ini harus memuat kewajiban penerapan prinsip Handep (kolaboratif) dan Hatamuei (pelayanan ramah/musyawarah) dalam setiap alur layanan aplikasi,

sehingga nilai tersebut menjadi sistemik dan tidak hilang saat terjadi pergantian kepemimpinan.

- Desain Antarmuka yang Inklusif Secara Kultural (Culturally-Adaptive UI/UX): Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) disarankan untuk mengembangkan guideline desain aplikasi yang mengakomodasi simbol, bahasa, dan visual lokal Dayak. Hal ini termasuk penyediaan fitur opsi bahasa daerah atau panduan visual sederhana pada aplikasi layanan publik untuk menjembatani kesenjangan literasi digital pada masyarakat adat dan lansia.
- Peningkatan Kompetensi Kultural ASN: Program pengembangan kapasitas ASN tidak boleh hanya berfokus pada pelatihan teknis IT, tetapi juga harus mencakup pelatihan "Kompetensi Digital Kultural". ASN perlu dibekali pemahaman bagaimana menerjemahkan nilai filosofis Huma Betang ke dalam etika pelayanan digital (misalnya: response time yang cepat sebagai bentuk penghormatan, dan penggunaan bahasa yang humanis dalam merespons aduan warga).

2. Bagi Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat (Aspek Kolaborasi) Mengingat peran vital local values sebagai "jembatan kepercayaan" (trust bridge), disarankan agar:

- Institusionalisasi Peran "Duta Digital Adat": Lembaga Kedamangan dan Mantir Adat sebaiknya dilibatkan secara formal dalam struktur tata kelola Smart City atau tim percepatan digitalisasi daerah. Peran mereka ditingkatkan dari sekadar objek sosialisasi menjadi "Duta Digital" yang aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat teknologi menggunakan pendekatan budaya, guna meminimalisir resistensi dan hoaks.
- Revitalisasi Forum Musyawarah: Masyarakat didorong untuk memanfaatkan platform digital yang disediakan pemerintah bukan hanya untuk pengaduan, tetapi sebagai ruang deliberatif (e-Musyawarah) untuk mengusulkan pembangunan, menjaga agar semangat gotong royong tetap hidup dalam ekosistem digital.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya (Aspek Akademis) Mengingat keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada satu lokus, disarankan bagi penelitian di masa depan untuk:

- Studi Komparatif Lintas Budaya: Melakukan penelitian serupa di daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik budaya berbeda (misalnya budaya hierarkis vs. egaliter) untuk menguji apakah model "Konvergensi Digital–Nilai Lokal" ini dapat diterapkan secara universal atau bersifat kasuistik (kontekstual).
- Pendekatan Kuantitatif/Mixed-Method: Mengembangkan instrumen kuantitatif untuk mengukur korelasi antara "integrasi fitur budaya" dalam aplikasi dengan "tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat". Hal ini diperlukan untuk memberikan bukti statistik yang lebih kuat mengenai dampak ekonomi dan sosial dari digitalisasi berbasis budaya.
- Analisis Kritis Sisi Gelap Digitalisasi Adat: Mengkaji potensi konflik atau disruptif nilai yang mungkin muncul, seperti isu privasi data masyarakat adat atau komodifikasi simbol budaya dalam platform digital pemerintah, untuk memberikan gambaran yang lebih berimbang mengenai transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Cordella, A., & Tempini, N. (2020). Government digitalization: A review of socio-technical approaches. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101–145.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). Digital-era governance: IT corporations, the state, and e-government. Oxford University Press.
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Schneider, C. (2020). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101–123.
- Moore, M. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
- Nabatchi, T., & Sancino, A. (2021). Public values, legitimacy, and citizen engagement in digital governance. *Public Administration Review*, 81(4), 610–624.
- Prabowo, T. J. W. (2020). Local values and innovation adoption in public sector organizations. *Journal of Asian Public Policy*, 13(2), 233–246.
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). The institutional logics perspective. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage Publications.
- Yuliani, N., Hutabri, E. S., & Mersyah, R. (2021). Local wisdom and public innovation: A framework for culturally-grounded governance. *International Journal of Public Sector Management*, 34(7), 812–828.
- Al Athoillah, R. (2020). Digital Governance in Local Governments: Challenges and Opportunities in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 12(1), 45–60.
- Alcaide-Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López-Hernández, A. M. (2017). E-government research in the field of public administration. *Information Polity*, 22(3), 231–269. <https://doi.org/10.3233/IP-170392>
- Alfahham, H. (2023). Cultural Dimensions in Public Digital Transformation: A Systematic Review. *Government Information Quarterly*, 40(2), 1–13.

- Anthopoulos, L. (2017). Smart City and Smart Government: Synonymous or Complementary? *International Journal of Electronic Government Research*, 13(2), 1–11. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2017040101>
- Ariyanto, K., & Sari, D. P. (2021). Integrasi nilai kearifan lokal dalam pelayanan publik berbasis digital. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 115–130.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2020). Digital Government: A Research Review. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101–439. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101439>
- Basri, A., & Ramadhan, D. (2020). Kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 25(1), 12–25.
- Becker, J., Niehaves, B., & Krause, A. (2017). Cultural impacts on e-government adoption. *Electronic Government*, 14(3), 243–260.
- Bertot, J., Jaeger, P., & Hansen, D. (2018). The impact of policies on government social media usage. *Government Information Quarterly*, 35(1), 30–44.
- Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2020). E-government and organizational change: Reframing the role of ICT. *Public Management Review*, 22(5), 676–697.
- Darmawan, I., & Nugraha, A. (2022). Tantangan digitalisasi administrasi di daerah pedesaan Indonesia. *Jurnal Transformasi Digital*, 4(1), 77–91.
- Ekosiswoyo, R., & Budiadi. (2021). Huma Betang sebagai identitas sosial budaya masyarakat Dayak Kalimantan. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 6(2), 55–70.
- Fang, Z. (2023). Digital Transformation and Public Sector Modernization. *Government Information Quarterly*, 40(3), 102–150.
- Fischer, F., & Miller, G. (2017). *Handbook of Public Policy Analysis*. Routledge.
- Hapsari, T., & Prasetyo, A. (2021). Penerimaan teknologi digital dalam birokrasi lokal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 90–104.
- Heeks, R. (2018). *Information and Communication Technology for Development*. Routledge.
- Indrayani, Y., & Setiawan, T. (2020). Pelayanan publik digital berbasis partisipasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 34–49.
- Kuswarno, E. (2019). Etnografi Komunikasi. Simbiosa Rekatama Media.

- Luna-Reyes, L. F., & Gil-García, J. R. (2014). Digital government transformation and public value creation. *Information Polity*, 19(1–2), 87–101.
- Misrawi, J., & Widodo, A. (2022). Reformasi birokrasi digital di Indonesia: Tinjauan kritis. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(3), 210–225.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Elex Media.
- Orlikowski, W. (2020). Sociomateriality in organizational studies. *Academy of Management Annals*, 14(2), 617–652.
- Rahman, F., & Salam, A. (2021). Kearifan lokal dalam inovasi pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 3(1), 22–35.
- Setyawati, E., & Nuraini, S. (2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 8(1), 14–27.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2015). *Basics of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Syafitri, R., & Mahfud, C. (2020). Kearifan lokal dan transformasi digital. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(4), 112–125.
- Tilaar, H., & Nugroho, D. (2020). *Kebijakan Pendidikan dan Multikulturalisme*. Gramedia.
- UNDP. (2018). *Digital Transformation for Development*. United Nations Development Programme.
- Yamin, M., & Suganda, D. (2022). Peran nilai adat dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Civic Culture*, 10(2), 55–70.